



PEMERINTAH ACEH

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH
TAHUN 2023 - 2026**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, merupakan salah satu acuan induk dalam menyusun rencana kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, diharapkan dapat menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026

Penyusunan Renstra hendaknya menjamin peningkatan pengembangan dan profesionalisme pengelolaan perpustakaan serta kelangsungan pemeliharaan keselamatan koleksi arsip dan bahan pustaka yang merupakan tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagai penyelenggara urusan umum pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Demikian Renstra ini disusun, diharapkan adanya saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan, terima kasih.

Banda Aceh, Maret 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dr. Edi Yandra, S. STP, MSP

Pembina Utama Muda

NIP. 19751105 199612 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Pengertian

Rencana strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Renstra SKPD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Tugas dan Fungsi SKPA. RPJM merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah terpilih. RPJM Aceh 2017-2022 berakhir pada tahun 2022 sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak nasional terhadap Kepala Daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut perlu diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Sebagai dampak dari kebijakan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dapat menyebabkan pejabat Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 diharapkan dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

2. Fungsi

Sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah Aceh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berkewajiban menyiapkan Renstra yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2023-2026. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

3. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RENSTRA Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menyusun rancangan renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026
- b. Penetapan SK Tim Penyusun Renstra pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2003-2006 pada tanggal 04 Januari 2022
- c. Penyusunan Draft awal Renstra dengan Tim Penyusun pada tanggal 19 Januari 2022.
- d. Desk rancangan awal RENSTRA SKPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022 di BAPPEDA Aceh.
- e. Desk Rancangan Akhir tanggal 4 April 2022 di BAPPEDA Aceh.
- f. Desk Rancangan Akhir Renstra Tanggal 5 - 7 April 2022.

4. Keterkaitan Dengan RPA

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir pada tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Pemerintah Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disebut Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang RPJP Aceh 2012-2032, Aceh masuk ke Tahapan Pembangunan Ke-4 (2023 – 2025), yang merupakan rangkaian akhir tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang

diharapkan pada akhir periode ini akan terwujud masyarakat ***Aceh yang islami, maju, damai, dan sejahtera***. Prioritas pembangunan yang dituangkan dalam renstra pada periode ini harus sesuai dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam RPA 2002-2006.

Selain itu, penyusunan renstra harus memperhatikan Isu-isu strategis yang berkembang diantaranya :

1. Penanganan Covid-19

Pandemi covid 19 pada saat ini, bukan hanya menjadi perhatian nasional, akan tetapi merupakan masalah yang dihadapi seluruh dunia. Dampak dari pandemi ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 menjadi prioritas program yang harus diimplementasikan pada tahun 2023-2026

2. Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada ditahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama. Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan sesuai tahapan yang dimulai dengan pendaftaran parpol sampai rekapitulasi perhitungan suara. Pelaksanaan demokrasi ini menjadi program yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh

3. Dana Otsus

Dana OTSUS pada tahun 2023 s.d 2027 turun menjadi 1% dari DAU Nasional dan diprediksi pada tahun 2028 tidak ada lagi. Penggunaan dana OTSUS harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana amanat dalam UU-PA Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus

4. Pekan Olahraga Nasional

Pekan Olahraga Nasional (PON) akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan Aceh Bersama dengan Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah. Pemerintah Aceh

sekarang harus focus untuk merencanakan dan membangun sarana prasana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PON.

5. Renstra K/L

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masa 2023-2026 merupakan kesinambungan dan keberlanjutan dari nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 serta memperhatikan Renstra Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2020-2024 dan Renstra Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia 2020-2024. Hal ini untuk menjamin sinergitas dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- g) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5898);
- j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006/ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi bangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
 - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- l) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
- m) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2025;
- n) Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2025;
- o) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005-2025;
- p) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Propinsi Aceh;
- q) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
- r) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Aceh.
- s) Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2023 - 2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja- SKPA).

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang perpustakaan dan kearsipan selama 4 tahun ke depan;
2. Memberikan kerangka landasan sekaligus tolok ukur bagi pencapaian tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026;
3. Sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan

- masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Sebagai media informasi kepada para pemangku kepentingan terkait rencana program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam upaya Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 5. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri No.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang yang mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;
 6. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 7. Menyelaraskan Program dan Kegiatan Prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 oleh Pejabat Pj. Gubernur Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika 67 yRenstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terdiri atas pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan. Pada bahasan selanjutnya dipaparkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan dan tantangan, serta pemanfaatan peluang yang ada. Selanjutnya dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan dinas.

Pada bab selanjutnya tertuang rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPA yang tertuang dalam bentuk lampiran tabel pada akhir pembahasan renstra.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan. Dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

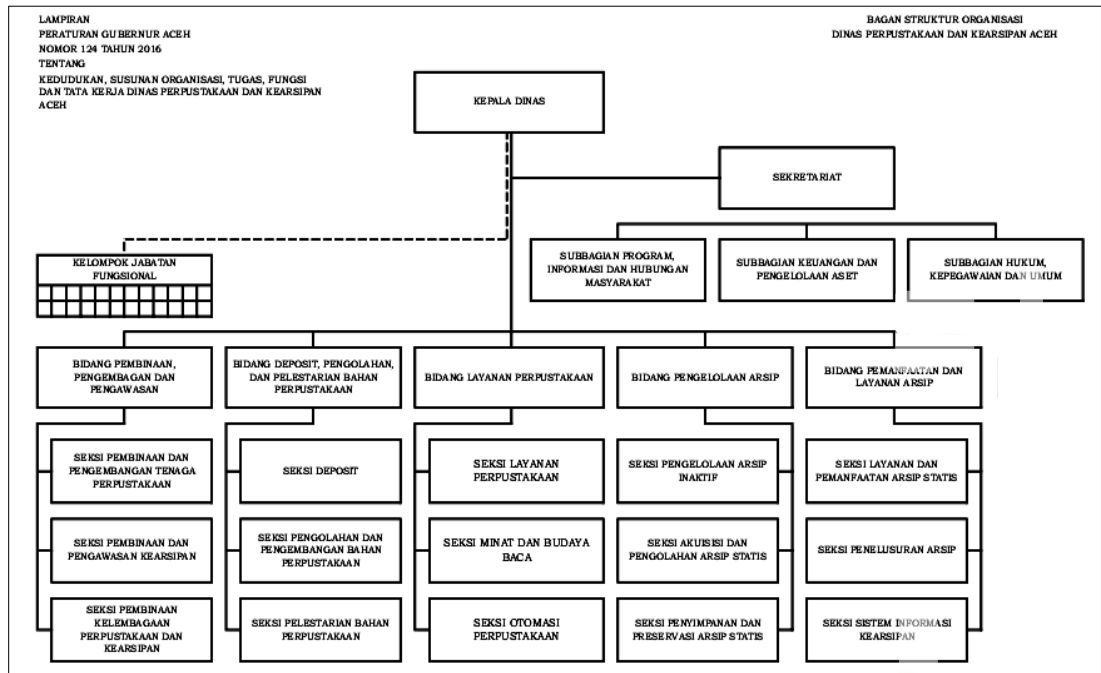
Adapun fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah sebagai berikut.

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c) Perumusan kebijaksanaan teknis program Perpustakaan dan Kearsipan;
- d) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan;
- e) Pengelolaan/pengolahan bahan pustaka dan arsip/dokumentasi;
- f) Pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi;
- g) Penyelenggaraan deposit dan pelestarian citra daerah serta khasanah arsip;
- h) Penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- i) Pengembangan kelompok jabatan fungsional di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- j) Pembinaan pelaksana teknis perpustakaan keliling dan lembaga pemasyarakatan (LP).

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi.

- a. Dasar hukum tentang pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:
 - 1.) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
 - 2.) Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

b. Struktur Organisasi:



- 1) **Kepala Dinas** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala dinas mempunyai fungsi :

- pelaksanaan penyusunan kebijakan regional Aceh dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan dilingkungan Pemerintahan Aceh;
- pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Perpustakaan Aceh dengan mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan;
- pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Perpustakaan Aceh dengan mengacu kepada penyelenggaraan Perpustakaan nasional yang meliputi penyusunan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan serta pendanaan;
- pelaksanaan pengawasan kearsipan yang merupakan tugas perbantuan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat;
- pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kearsipan Aceh pada organisasi perangkat Aceh, lembaga kearsipan kabupaten/kota, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan (ormas)/organisasi politik, lembaga pendidikan, dan masyarakat; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai bidang tugasnya.

2) Sekretariat Dinas terdiri dari subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat yang dikoordinir oleh Sub Koordinator Program; Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset yang dikoordinir oleh Sub Koordinator Keuangan dan Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum yang dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian.

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan program, informasi dan hubungan masyarakat, subbagian keuangan dan pengelolaan asset, dan subbagian hukum, kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan serta hubungan masyarakat dan protokoler;
- b. mengelola administrasi keuangan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
- c. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, dan urusan ketatausahaan;
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. menyusun rencana strategis, program kerja tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, rencana kinerja, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber dana lainnya;
- f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
- g. mengelola *website*, sistem informasi perpustakaan, Sistem Informasi Kearsipan Aceh (SIKA) yang meliputi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan sistem informasi kearsipan statis (SIKS), serta Jaringan Informasi Kearsipan Aceh (JIKA);
- h. mengelola perangkat teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan dan kearsipan;
- i. menghimpun dan mengunggah data informasi perpustakaan dan kearsipan kedalam sistem informasi perpustakaan dan SIKA;
- j. melaksanakan penyediaan akses hubungan masyarakat dan protokoler.

- k. mengelola administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik dan keuangan;
- l. mengelola barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
- m. melaksanakan pemeliharaan, penilaian, penghapusan asset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
- n. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan pembinaan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

3) **Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan** terdiri atas; Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan yang dikoordinir oleh Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di koordinir oleh Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan; dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan dikoordinir oleh Sub Koordinator Pembinaan Kelembagaan.

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
- b. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan perpustakaan dan kearsipan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan pembinaan kelembagaan perpustakaan dan kearsipan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan perpustakaan dan kearsipan yang berskala provinsi dan kabupaten/kota serta pembinaan pengembangan perpustakaan sekolah, /madrasah, perpustakaan LP, perpustakaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di lingkungan pemerintah aceh, taman baca masyarakat (TBM), perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan gampong/desa, perpustakaan puskesmas, perpustakaan pesantren, dan perpustakaan masjid/rumah ibadah;
- f. pelaksanaan pendataan kelembagaan dan tenaga pengelola perpustakaan kabupaten/kota;

- g. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap sumber daya manusia kearsipan, SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan berskala provinsi, badan usaha milik aceh/perusahaan daerah aceh, perusahaan swasta berskala provinsi, lembaga pendidikan berskala provinsi, dan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan pengawasan kearsipan terhadap SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, lembaga kearsipan kabupaten/kota, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan berskala provinsi, Badan Usaha Milik Aceh/Perusahaan Daerah Aceh (PDPA), perusahaan swasta berskala provinsi dan lembaga pendidikan berskala provinsi.

4) **Bidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian bahan Perpustakaan**

terdiri atas: Seksi Deposit dikoordinir oleh Sub Koordinator Deposit; Seksi Pengolahan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan dikoordinir oleh Sub Koordinator Pengolahan dan Pengembangan; dan Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan dikoordinir oleh Sub Koordinator Pelestarian. Bidang ini mempunyai fungsi pelaksanaan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam sebagai berikut:

1. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literature daerah;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam
3. pelaksanaan penerimaan, pengolahan dan verifikasi bahan perpustakaan;
4. pelaksanaan penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
5. pelaksanaan dan pengendalian terhadap verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke sistem informasi perpustakaan;
6. pelaksanaan penyusunan literature sekunder;
7. pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian survei kondisi bahan perpustakaan;
8. pelaksanaan dan pengelolaan fumigasi bahan perpustakaan dua kali dalam setahun;
9. pelaksanaan dan pengendalian terhadap kontrol kondisi ruang penyimpanan secara rutin dan berkesinambungan;

10. pelaksanaan dan pengelolaan terhadap pembersihan debu dan noda, pemutihan, deasidifikasi, mending, filling, penjilid dan bahan perpustakaan;
 11. pelaksanaan alih media bahan perpustakaan melalui perekaman, penduplikasian;
 12. pelaksanaan publikasi koleksi deposit.
- 5) **Bidang Layanan Perpustakaan** terdiri atas: Seksi Layanan Perpustakaan dikoordinir oleh Sub Koordinator Layanan Perpustakaan; Seksi Minat dan Budaya Baca dikoordinir oleh Sub Koordinator Minat; dan Seksi Otomasi Perpustakaan dikoordinir oleh Sub Koordinator Otomasi. Bidang ini mempunyai fungsi:
- a. melakukan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan perpustakaan;
 - c. melaksanakan standar layanan minimal kepada pemustaka;
 - d. menyediakan akses dan layanan informasi perpustakaan;
 - e. menghimpun dan mengunggah data informasi perpustakaan kedalam sistem informasi perpustakaan;
 - f. melaksanakan administrasi layanan perpustakaan;
 - g. melaksanakan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi dan layanan perpustakaan keliling;
 - h. melaksanakan *stock opname* dan penyiangan bahan perpustakaan;
 - i. melaksanakan publikasi dan promosi layanan;
 - j. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca;
 - k. melakukan pengkajian minat baca masyarakat;
 - l. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. melakukan pengkajian minat baca masyarakat;
 - n. membudayakan kegemaran membaca;
 - o. mengoordinasikan pembudayaan kegemaran membaca;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca;
 - q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis otomasi perpustakaan;

- r. melayani masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap, karena dilokasi tersebut belum terdapat gedung perpustakaan;
 - s. melayani masyarakat yang oleh situasi dan kondisi tertentu tidak dapat datang atau tercapai perpustakaan menetap;
 - t. mempromosikan layanan perpustakaan kepada masyarakat yang belum pernah mengenal perpustakaan;
 - u. memberi layanan yang bersifat sementara sampai perpustakaan menetap dapat dibangun; dan
 - v. menggantikan fungsi perpustakaan menetap apabila situasi tertentu tidak memungkinkan untuk dibangun perpustakaan menetap ditempat tersebut, misalnya karena penduduknya terlalu sedikit;
- 6) **Bidang Pengelolaan Arsip** terdiri atas: Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif dikoordinir oleh Sub Koordinator Pengelolaan; Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis dikoordinir oleh Sub Koordinator Akuisisi; serta Seksi Penyimpanan dan Preservasi Arsip Statis dikoordinir oleh Sub Koordinator Penyimpanan. Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan akuisisi dan pengolahan arsip statis;
 - b. pelaksanaan penyusunan jadwal retensi arsip (JRA);
 - c. pelaksanaan penyimpanan dan preservasi arsip;
 - d. pelaksanaan akses dan penyediaan informasi arsip dinamis dan statis;
 - e. penyusunan pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip inaktif;
 - f. pembinaan unit pengolah di lingkungannya dalam menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama enam bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - g. penyiapan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke records center;
 - h. pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif di *records center*;
 - i. pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip, penyusunan daftar arsip inaktif.
 - j. penyusunan jadwal retensi arsip;

- k. pengolahan dan penyajian arsip inaktif menjadi informasi untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
- l. monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;
- m. persiapan penetapan status arsip statis;
- n. persiapan penyerahan arsip statis dari unit kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Provinsi Aceh;
- o. penerimaan fisik arsip dan daftar arsip;
- p. penataan informasi arsip statis;
- q. penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip-arsip statis dalam bentuk guide arsip statis, daftar arsip statis, dan inventaris arsip statis;
- r. pembuatan Daftar Pencarian Arsip (DPA);
- s. pemberian penghargaan dan imbalan kepada masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan arsip statis yang masuk dalam DPA.
- t. penyimpanan, pemeliharaan, dan perlindungan arsip statis;
- u. perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;
- v. alih media dan reproduksi arsip statis; dan
- w. pengujian autentisitas arsip statis.

7) **Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip**

Seksi yang diuraikan masih belum sesuai dengan struktur organisasi terdiri atas: Seksi Pemanfaatan dan Layanan Arsip yang dikoordinir oleh Sub Koordinator Layanan dan Pemanfaatan layanan arsip, Penelusuran Arsip dikoordinir oleh Sub Koordinator Penelusuran arsip, Seksi Sistem Informasi Kearsipan dikoordinir oleh Sub Koordinator Informasi.

Bidang Pemanfaatan dan Layanan Arsip mempunyai fungsi.

- a. pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis layanan dan pemanfaatan arsip;
- b. pelaksanaan layanan arsip inaktif dan arsip statis;
- c. pelaksanaan penyediaan Sistem Informasi Kearsipan Aceh (SIKA) yang meliputi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS);

- d. pelaksanaan data informasi kearsipan kedalam SIKA;
- e. pelaksanaan penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Aceh (JIKA) sebagai simpul JIKN;
- f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SIKA dan JIKA serta menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional;
- g. layanan arsip dinamis dan arsip statis;
- h. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKA;
- i. publikasi dan pameran arsip statis;
- j. pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- k. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKA (SIKD DAN SIKS) dan JIKA sebagai simpul jaringan JIKN serta menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sampai dengan tahun 2022 berjumlah 106 PNS, terdiri atas 61 laki-laki, 45 perempuan dan 76 tenaga honorer, terdiri dari 46 laki-laki dan 30 perempuan.

Komposisi pegawai dan tenaga kontrak Dinas Perpustakaan Aceh berdasarkan jenis kelamin, golongan ruang dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOLONGAN RUANG			PENDIDIKAN				
			L	P	II	III	IV	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala Dinas	1	1				1					1
2	Sekretaris	1	1				1				1	
3	Kepala Bidang	5	5			1	4			1	4	
4	Kasubbag/Subkordinator	16	8	8		15	1	1		4	11	
5	Fungsional tertentu/khusus	54	23	31		45	9	2	4	47	1	
6	Staf/Fungsional Umum	30	24	6	4	26		9		19	2	
7	Tenaga kontrak	76	46	30				28	8	40		
	JUMLAH	183	108	75	4	87	16	40	12	111	19	1

2.2.2. Aset/Modal

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai dua lokasi Gedung yaitu gedung layanan perpustakaan dan gedung arsip. Gedung layanan perpustakaan yang saat ini dalam proses finising, mempunyai luas bangunan 10.614,05 m² dengan luas tanah 5.348 m², sedangkan luas tanah arsip 10.566 m², mempunyai 4 bangunan, yang bangunan utama digunakan sebagai sarana administrasi dan layanan arsip, untuk Gedung Depo digunakan sebagai sarana penyimpanan arsip dan pengolahan arsip, dan 2 gedung lainnya saat ini digunakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, selain keempat Gedung tersebut dikomplek arsip juga mempunyai satu musalla dengan luas bangunan 120 m² dan didukung dengan prasarana dan sarana lainnya.

2.2.3 Unit Usaha yang Masih Beroperasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memiliki 1 unit usaha, yaitu kantin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan Koperasi untuk Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

2.3.1. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode yang lalu, SPM, MDGs atau indicator kinerja pelayanan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memberikan pelayanan baik pelayanan kedalam secara internal yaitu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik kepada masyarakat umum melalui pelayanan perpustakaan umum dan pemanfaatan jasa kearsipan, untuk membantu menjalankan operasional kegiatan tersebut didukung pula oleh tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis serta tenaga kontrak dari berbagai disiplin ilmu.

Analisis kinerja pelayanan SKPA menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA berdasarkan sasaran kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memberikan pelayanan baik pelayanan kedalam secara intern, yaitu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik kepada masyarakat umum. Pelayanan dimaksud dilakukan melalui pelayanan perpustakaan umum dan

pemanfaatan jasa kearsipan. Untuk membantu menjalankan operasional kegiatan tersebut didukung pula oleh tenaga fungsional pustakawan, arsiparis dan tenaga kontrak dari berbagai disiplin ilmu.

Analisis kinerja pelayanan SKPA menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA berdasarkan sasaran/target Renstra SKPA periode sebelumnya 2017 - 2022, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPA, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan SKPA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017 – 2022 (Tabel T-C.23).

2.3.2. Interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran (Tabel T-C. 24).

Interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah.

Dari tabel T-C .24 bisa disimpulkan realisasi dari anggaran yang disediakan tidak mengalami masalah karena realisasi semua program kegiatan diatas 90% dari empat tahun penyajian data.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota

Untuk mengkomodir renstra kabupaten/kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah menyelenggarakan rapat koordinasi program/kegiatan kabupaten/kota. Dari hasil rakor tersebut diketahui bahwa kabupaten/kota lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah bersinergi dalam perencanaan dan pengembangan budaya baca dan pengembangan arsip.

2.4.2. Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi. Rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPA. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPA dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPA dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPA dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah rencana struktur tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, penerapan sistem pelayanan perpustakaan dan kearsipan kabupaten/kota berfungsi untuk melayani kegiatan pelayanan perpustakaan dari kabupaten/kota sampai beberapa kecamatan dan desa.

Hasil penilaian terhadap kondisi lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa kab/kota pada umumnya belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendukung (Gedung Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan).

Pengembangan sistem pelayanan perpustakaan dan kearsipan juga akan dikembangkan sampai ke tingkat kecamatan dan desa/gampong. Hal ini terkait dengan program pengembangan minat dan budaya baca yang telah di gariskan dalam program pendidikan nasional. Lokasi pengembangan pelayanan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh untuk lima tahun mendatang di arahkan bagi kabupaten/kota dan kecamatan yang belum memiliki gedung pelayanan perpustakaan yang akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kucuran anggaran dari pemerintah.

Untuk kajian lingkungan hidup strategis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tupoksi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perpustakaan dan kearsipan tidak terlepas dari apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kebijakan Rencana Program (KRP) yang ditetapkan dalam RPJM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh harus memperhatikan masalah lingkungan

hidup, khususnya terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan beberapa kebijakan rencana program yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Infrastruktur yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan gedung layanan perpustakaan kab/kota untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Aceh secara menyeluruh. Penerapan dokumen lingkungan dalam setiap pelaksanaan pembangunan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan Rencana Program Kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat meminimalisasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan kewajiban pemerintah, untuk menjamin setiap warga negara agar memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya mencapai kondisi kecerdasan. Negara memberi kesempatan dan menyediakan sarana belajar yang menunjang peningkatan kapasitas tersebut. Dalam konteks ini, pembangunan dibidang perpustakaan dan kearsipan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat.

Pembangunan di bidang Perpustakaan merupakan subsistem pembangunan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar dan masyarakat yang kritis sebagai basis pengembangan masyarakat keilmuan menuju masyarakat yang terinformasi, cerdas, inovatif dan produktif melalui pengembangan budaya baca, budaya menulis dan pelestarian hasil karya cipta bangsa.

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat.

Menyadari peran strategis tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menyusun kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Aceh sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam bidang kearsipan terus diupayakan pelacakan terhadap naskah-naskah penting yang bernilai guna tinggi dan yang sampai sekarang ini masih sangat banyak berada pada masyarakat luas, naskah tersebut tersebar diberbagai daerah di Aceh maupun diluar Aceh bahkan di luar negeri.

Arsip merupakan memori kolektif bangsa, oleh karenanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berkewajiban memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dibangun

tempat penyimpanan arsip (depo) di beberapa wilayah untuk mendukung program penyelamatan arsip.

2.4.3. Penanganan Covid-19 yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat dilihat dari berbagai aspek kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan di banyak negara disebabkan oleh adanya darurat kesehatan terburuk dalam sejarah modern dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bencana ini telah dinyatakan sebagai bencana nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari, target-target pembangunan tidak dapat dicapai di tahun 2020, termasuk pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Di sisi lain, tugas bidang perpustakaan dan kearsipan semakin penting di masa darurat ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diharapkan dapat memberikan edukasi informasi tentang penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada masyarakat melalui buku bacaan, dan melestarikan pendokumentasian seluruh arsip keputusan dan tindakan resmi yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan penanganan pandemik.

2.4.4. Angka Kemiskinan yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan perangkat daerah

Angka kemiskinan di Aceh saat ini masih di atas rata-rata nasional yaitu 15,33%, terkait hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berperan dalam mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan reformasi social dengan menetapkan peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas serta meningkatkan SDM.

2.4.5. Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di lakukan di seluruh Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diharapkan dapat menyelamatkan dan malestream seluruh arsip keputusan dan tahapan pelaksanaan terkait dengan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Aceh.

2.4.6. Stunting yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan perangkat daerah

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik pada anak. Bertubuh pendek merupakan salah satu indikasi dari anak dengan kondisi terganggunya pertumbuhan otak. Penyebab tingginya angka stunting di Aceh dikarenakan sebagian kelahiran bayi sudah dalam kondisi kekurangan nutrisi, lalu dibesarkan juga dengan kekurangan zat gizi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berperan penting dalam memberikan informasi dan edukasi melalui bahan bacaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting.

BAB III

PERMASAALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi dan berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Disamping itu juga memiliki berbagai macam isu strategis.

Secara umum permasalahan dan isu-isu strategis bidang perpustakaan dan kearsipan sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan aceh 2023-2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1. Permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memberikan pelayanan kedalam secara internal, yaitu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik kepada masyarakat umum melalui pelayanan perpustakaan umum dan pemanfaatan jasa kearsipan. Untuk membantu menjalankan operasional kegiatan tersebut didukung pula oleh pustakawan, arsiparis dan tenaga non PNS dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam rangka menjalankan operasional perpustakaan dan kearsipan di kabupaten/kota hampir semua kabupaten/kota di Aceh telah membentuk lembaga perpustakaan dan kearsipan. Namun, belum tersedianya gedung yang memadai merupakan suatu permasalahan yang memerlukan perhatian yang khusus bagi Pemerintah untuk mengatasinya.

Gedung Layanan Perpustakaan yang saat ini belum selesai menjadi salah satu factor permasalahan dalam menyikapi rendahnya minat baca masyarakat, hal ini disebabkan adanya darurat kesehatan terburuk dalam sejarah modern dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga terhambatnya pembangunan gedung dikarenakan terjadinya pemotongan anggaran untuk mengatasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, pemerintah sangat diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk tahun 2023 dan 2023 demi kesempurnaan atau berfungsional Gedung Layanan Perpustakaan Aceh dimaksud.

Disamping kondisi umum tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga melaksanakan kegiatan yang spesifik dengan menjalankan operasional layanan perpustakaan keliling, lomba bercerita untuk anak-anak, pemilihan raja dan ratu baca. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan minat dan budaya baca masyarakat khususnya anak-anak. Bahkan untuk menampung minat pemustaka yang semakin tinggi, dilakukan layanan diluar jam dinas yaitu layanan pada hari Sabtu dan Minggu.

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sebagaimana di atas, ada beberapa permasalahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain :

1. Indeks Pembangunan Manusia Angka IPM Aceh dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. IPM Aceh pada tahun 2021 sebesar 72,18, naik 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya (2020) sebesar 71,99. Sedangkan IPM Nasional pada tahun 2021 relative lebih tinggi dan berada di atas rata-rata IPM Aceh yaitu sebesar 72.29. Kondisi pencapaian nilai IPM Aceh ini masih menjadi perhatian yang serius mengingat terjadinya disparita pencapaian IPM antar kabupaten/kota masih cukup tinggi.
2. Masih rendahnya kualitas dan daya saing Pendidikan, dimana ranking sekolah menengah (top 1000 UTBK) di Aceh hanya menyisakan 2 sekolah ditahun 2020 sekaligus menjadi yang terendah di Sumatera;
3. Masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, dimana Aceh 9,37 dan nasional 8,54 tahun 2021;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana SLB, dimana perbandingan ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) adalah 1 : 1,6 atau dua kali lipat perbandingan ruang kelas dan rombel SMA (1 : 0,8). Selain itu, pendidik tersertifikasi untuk SLB sangat rendah yakni sebesar 15,5 persen atau dapat diinterpretasikan lebih dari 84 persen dari pendidik SLB tidak tersertifikasi;
5. Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana indeks pembangunan literasi masyarakat Aceh tahun 2020 masih sebesar 12,11 sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,45 dan yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 48,7;
6. Berkurangnya Dana Otonomi Khusus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sector pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut

- mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen;
7. Rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen.
 8. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah/lembaga Pendidikan/ perusahaan dan masyarakat/publik terhadap kebijakan kearsipan masih rendah. Hal ini terjadi karena secara kelembagaan maupun kebijakan kearsipan belum berjalan optimal. Sinkronisasi pelaksanaan Undang-undang Kearsipan dengan undang-undang lainnya juga belum berjalan secara harmonis, khususnya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 9. Penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan dalam setiap organisasi dan masyarakat maupun individu yang meluas khususnya di aceh tentunya sangat membutuhkan SDM yang jumlahnya mencukupi dan kualitasnya memadai. Namun SDM Perpustakaan dan kearsipan sampai saat ini belum memadai. SDM yang sudah tersediapun masih memiliki kompetensi yang terbatas. Tentunya ini menjadi kendala dan isu yang paling krusial di bidang perpustakaan dan kearsipan.
 10. Minimnya anggaran untuk layanan perpustakaan dan kearsipan yang menyebabkan beberapa kegiatan layanan perpustakaan harus dihentikan beberapa tahun terakhir seperti layanan Perpustakaan pada malam hari;
 11. Kurangnya koleksi perpustakaan digital (*e-book*) yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di era Revolusi Industri 4.0; dan Kurangnya Inovasi atau kegiatan yang bisa meningkatkan gerakan gemar membaca;

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Aceh dalam mempertinggi minat dan budaya baca serta menggerakkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Disisi lain, tidak optimalnya upaya-upaya untuk menyelamatkan arsip dapat menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien. Konsekuensi logis dari hal ini adalah akan berdampak buruk-baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.1.2. Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

NO	PERMASAALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
3.	Minat baca masyarakat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Koleksi Bahan Perpustakaan belum lengkap sesuai SNP, - Kurangnya gebrakan atau kegiatan yang bisa meningkatkan gerakan gemar membaca - Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen stakeholder untuk koleksi perpustakaan lengkap - Kerjasama dengan semua pihak terutama sekolah dan yayasan agar berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan minat baca - Penguatan dukungan Pemerintah untuk memfasilitasi Perpustakaan
1.	SDM yang kurang berkompentensi	<ul style="list-style-type: none"> - Kaderisasi SDM Perpustakaan dan Kearsipan masih rendah - Kurangnya pelatihan service excelent (pelayanan terbaik) dan motivasi untuk pengembangan diri bagi SDM - Pejabat struktural kurang memahami tupoksi kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan secara teknis - Kurangnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya penyelamatan Arsip/Dokumen - Minimnya anggaran yang disediakan untuk bidang kearsipan dan perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertambahan SDM Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan bisa menjadi ujung tombak keberhasilan kinerja Dinas - Semakin bertambahnya tenaga pustakawan dan arsiparis diharapkan dapat berperan aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Melacak dan Melestarikan Arsip-Arsip Daerah yang ada dimasyarakat - Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Aceh dan Nasional (JIKA-JIKN) - Mengadakan pameran-pameran kearsipan untuk mempublikasikannya tentang khsanah budaya dan sejarah bangsa
2.	- Kurangnya pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan	- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Perpustakaan setelah dilaksanakan pembangunan gedung perpustakaan	- Penyebaran Perpustakaan diberbagai daerah serta prasarana Perpustakaan secara gratis

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.2.1. Faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pencapaian sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra.

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi pelayanan SKPA ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh antara lain:

- a) meningkatnya jumlah pengunjung /pemustaka dan tingginya minat baca masyarakat, sementara jumlah koleksi bahan pustaka dan jam pelayanan perpustakaan dirasakan masih kurang, sementara ruangan yang tersediapun tida tertampung;
- b) belum terakomodir beberapa usulan dalam hal permintaan permintaan buku bacaan, prasarana dan sarana pendukung; dan
- c) kurangnya kesadaran terhadap fungsi dan manfaat arsip di kalangan masyarakat.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1. Faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi dari implikasi RTRW dan KLHS

Faktor Pendorong implikasi RT RW dan KLHS adalah:

- a) Isu pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:
 - lanjutan pembangunan perpustakaan Provinsi Aceh yang pembangunannya belum rampung 100%;
 - pembangunan perpustakaan umum kabupaten/kota yang belum memiliki gedung perpustakaan sendiri, misalnya Kabupaten Aceh Barat Daya dan Simelue; dan
 - pembangunan Depo Arsip di 23 Kab/Kota.
- b) Pembangunan dan Pengadaan prasarana dan sarana perpustakaan dan kearsipan.

3.4. Isu-isu Strategis

3.4.1 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi Isu Strategis menampung isu-isu yang sifatnya kontemporer dan hal-hal lain yang perlu memperoleh perhatian secara khusus. Berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis baik secara nasional, regional, maupun internasional, yang berlangsung saat ini. Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dengan memperhatikan permasalahan yang ada, sasaran jangka menengah pada Rencana Pembangunan Aceh 2023 – 2026, RPJMN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, RPJMN Arsip Nasional Republik Indonesia, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan direspon melalui Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tahun 2023-2026 sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang ada adalah :

1. Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh, dimana indeks pembangunan literasi masyarakat Aceh tahun 2020 masih sebesar 12,11 sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,45 dan yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 48,7, sehingga pemerintah perlu memperkuat peningkatan minat baca masyarakat, memberikan sosialisasi dan penyediaan sarana prasarana dalam memudahkan masyarakat mendapatkan bahan bacaan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian yang lebih baik mengingat tingkat rata-rata lama sekolah masyarakat Aceh 9,33 tahun sehingga belum memenuhi target Pendidikan Universal 12 Tahun. Rendahnya kualitas SDM juga dapat dilihat dari distribusi pengangguran yang disumbangkan oleh penduduk tamatan SMA/ sederajat. Untuk itu Pemerintah perlu memperkuat upaya peningkatan kualitas dan daya saing lulusan SMA sederajat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Kesetaraan gender masih menjadi isu global yang tercantum dalam tujuan kelima SDGs, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, serta terintegrasi ke dalam setiap tujuan lainnya. Untuk itu pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) harus diperkuat dan diimplementasikan secara masif pada berbagai level pemerintahan.

a) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan sasaran jangka menengah pada renstra K/L, pada tabel berikut ini dapat dilihat permasalahan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Tabel T-C. 2.5

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Permasalahan peningkatan SDM
1	Meningkatnya Kunjungan Perpustakaan dan tumbuhnya minat baca yang besar dikalangan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan Perpustakaan dan minimnya kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan minat baca
		Orientasi pembangunan pojok baca Perpustakaan belum merata seperti beberapa Perpustakaan di Kabupaten/Kota.
		Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan pemerintah yang mendukung Perpustakaan
		Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberdayakan Perpustakaan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan Pemerintah arti pentingnya Arsip sebagai sumber sejarah dan alat pemersatu bangsa	Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Arsip sebagai sarana pemersatu bangsa
		Orientasi Pembangunan depo Arsip belum merata di beberapa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota
		Kurangnya SDM dibidang Arsip

Tabel Sasaran Jangka Menengah RTRW dan KLHS

Indonesia.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Permasalahan Pelayanan Dinas
1	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah mengantungi izin Pembangunan Perpustakaan terlebih dahulu dengan Pemerintahan setempat dan tidak ditemukan AMDAL dalam proses pembangunan
2	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena setiap pembangunan perpustakaan sudah dilakukan perencanaan terlebih dahulu

Metoda Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis

Indonesia	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Indeks membaca siswa rendah	Kurangnya prestasi masyarakat Indonesia dibidang pendidikan	Rendahnya minat budaya baca masyarakat di Aceh	Tuntutan untuk anak-anak di Aceh untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang mampu bersaing dan mengukir prestasi ditingkat nasional, regional dan internasional

3.4.3. Isu-Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat tahun rencana

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan penyelamatan arsip

sebagai sejarah dan pemersatu bangsa. Kualitas hidup bisa ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pendidikan dapat diperoleh melalui membaca. Membaca adalah jendela ilmu Pengetahuan, Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, yang menghargai budaya dan perjuangan bangsanya, Dalam konteks ini arsip adalah alat untuk pemersatu bangsa. Tanpa arsip, sejarah akan hilang.

Kedua aspek Perpustakaan dan Kearsipan merupakan isu strategi yang juga sangat penting dalam proses pembangunan daerah Aceh. Yang termasuk dalam isu strategis ini adalah: promosi perpustakaan, gebrakan atau kegiatan yang bisa meningkatkan minat baca, memperkenalkan arsip ke publik melalui pameran-pameran dan kegiatan lainnya, menggali dan menyelamatkan arsip yang masih ada dimasyarakat dan lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan periode ke-4 yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang telah tersebut di atas dan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP adalah dengan pembangunan sumberdaya manusia akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus Aceh yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirancang dalam RPA 2023-2026, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, telah menyusun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah RPA 2023-2026:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023 - 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja				
					Tahun				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,12	16,31	17,51	18,71	19,91	19,91
2	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang ada di aceh	Rasio naskah kuno yang ada di aceh	Rasio	0,03125	0,0375	0,04375	0,05	0,5625	0,5625
3	Pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	50	67	76	82	97	97
4	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	20	25	30	35	40	40
5	Terwujudnya Pelayanan Kearsipan yang berkualitas	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,007	0,010	0,011	0,013	0,015	0,015

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirancang dalam RPA 2023-2026, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan 2023-2026 sebagaimana tabel berikut :

Table 5.1
Tabel Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan	Meningkatnya minat baca masyarakat	Penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan perlombaan membaca	Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca
			Penyediaan koleksi bahan pustaka	Meningkatnya koleksi buku di perpustakaan
			Penyediaan sarana dan perasarana perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
			Peningkatan Karakter Pengelola Pustaka dan Pustakawan yang berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kapasitas dan daya saing pengelola pustaka dan pustakawan melalui sertifikasi dan pelatihan
2	Tersedianya Koleksi Naskah Kuno	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang ada di aceh	Pengumpulan Naskah Kuno pada Masyarakat	Penyediaan Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
3	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Pengelolaan Kearsipan secara Baku	Pelestarian dan Penyelamatan Arsip dokumen/arsip daerah	Pelacakan, alih media arsip
			Peningkatan pengawasan dan pembinaan secara internal dan eksternal	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara internal dan eksternal
			Penguatan Kapasitas SDM	Melakukan sertifikasi terhadap jabatan fungsional dan pengelola kearsipan
			Penguatan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik untuk Pelayanan kearsipan kepada publik (JIKN, JIKA, SIKD)	Melakukan publikasi dan promosi kearsipan dengan gerasakan aceh sadar arsip

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Adapun kebijakan/ tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program /kegiatan dan mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program dan/kegiatan yang mengarah pada indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan urusan Perpustakaan dan Kearsipan selama kurun waktu 2023-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempedomani strategi dan arah kebijakan yang tercantum pada table 5.1. Strategi dan kebijakan tersebut menentukan outcome dan output dari program dan kegiatan yang termaksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan, terdapat 5 (lima) program spesifik dan 1 (satu) program penunjang, yaitu :

6.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran administrasi kantor, oprasional kantor yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas. Keluaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompeten, optimalnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, sinergi perencanaan dan penganggaran lintas bidang, terkelolanya anggaran secara akuntabel, dan tersedianya ruang kerja yang bersih, rapi, estetik dan hijau (bereh). Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat melalui kegiatan dan sub-kegiatan sebagai berikut :

01. Administrasi Umum Perangkat Daerah

01.04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

05.10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

05.11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

06. Administrasi Umum Perangkat Daerah

06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

06.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

08.03. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

09.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

09.03. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun Program Unggulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mendukung pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun kedepan yaitu :

6.1.2. Program Pembinaan Perpustakaan

01. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

01.01. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

01.02. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi

01.03. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi

01.04. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

01.05. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi

01.06. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

01.07. Pengembangan Perpustakaan Deposit

01.08. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

02. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

- 02.01. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- 02.02. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- 02.03. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- 02.04. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

6.1.3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- 03.01. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
- 03.02. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
- 03.03. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

6.1.4. Program Pengelolaan Arsip

- 04.01. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
- 04.02. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
- 04.03. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

6.1.5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

- 05.01. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun.
- 05.02. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota.
- 05.03. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi.

6.1.6. Program Perizinan Penggunaan Arsip

- 06.01. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

6.2. Pendanaan

Kerangka pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2023-2026 Untuk melaksanakan kegiatan/kebijakan yang berdampak pada pencapaian target kinerja program dan sasaran utama dibutuhkan dukungan pendanaan. Kerangka kebutuhan pendanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tahun 2023-2026 dapat dilihat pada table 6.7.1 Kerangka pendanaan lebih rinci per sub-kegiatan, kegiatan, program dan sasaran dapat dilihat pada tabel. T.C 27

Table. 6.7.1

Kerangka Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah
		2023		2024		2025		2026		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH PAGU		60.138.678.771		51.760.012.329		51.910.090.054		53.185.090.054	216.993.871.208
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		37.982.378.554		37.854.559.554		37.839.559.554		37.704.559.554	151.381.057.216
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,0017	19.730.418.556	0,0018	11.416.922.275	0,0019	11.507.000.000	0,002	12.762.000.000	55.416.340.831
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,031	550.000.000	0,038	550.000.000	0,044	550.000.000	0,050	550.000.000	2.200.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	17	1.525.881.661	9	1.538.530.500	9	1.613.530.500	15	1.718.530.500	6.396.473.161
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	25%	421.012.802	30%	211.012.802	35%	240.982.802	40%	255.982.802	1.128.991.208
6	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	0,010	350.000.000	0,011	400.000.000	0,013	400.000.000	0,015	450.000.000	1.600.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan aceh 2023-2026, Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPA tahun 2023-2026 antara lain Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Rasio perpustakaan persatuan penduduk dan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Rasio tersebut dapat dilihat pada Tabel Indikator Kinerja Skpa Yang Mengacu Pada Sasaran, Tujuan Dan Sasaran.

Tabel. 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran PRA

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capain Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)
				1	2	3	4	
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Perpustakaan								
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	indeks	0,001	0,0017	0,0018	0,0019	0,002	0,002
	Rasio naskah kuno yang ada di aceh	Rasio	0,03125	0,0375	0,04375	0,05	0,5625	0,5625
B. Kearsipan								
	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	50	67	76	82	97	97
	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	20	25	30	35	40	40
	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,007	0,010	0,011	0,013	0,015	0,015

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2023 - 2026 yang telah disusun melalui suatu alur atau proses yang baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui pemikiran dan diskusi yang mendalam tentang rumusan perencanaan yang strategis bagi kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama kurun waktu empat tahun kedepan, seharusnya dapat dijadikan tolok ukur atau acuan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dan manfaat (*benefit*) yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2023 - 2026 diharapkan dapat dilaksanakan atau terwujud sebagaimana mestinya yang dapat menggambarkan penampilan perencanaan (*performance planning*) yang mudah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat tergantung pada keterlibatan, peran serta dan upaya sungguh sungguh dari segenap unsur di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh serta segenap *stakeholder* di bidang perpustakaan dan kearsipan Aceh.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun																	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	6	12	13	14	15	16	10	19	20	21	22	10	18
BIDANG PERPUSTAKAAN																						
1	Memasyarakatkan budaya gemar membaca				5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pengembangan Minat dan Budaya Baca				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat				5 Kab/kota	10 Kab/kota	13 Kab/kota	17 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	5 Kab/kota	10 Kab/kota	13 Kab/kota	17 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terkoordinasi Pengembangan Perpustakaan				7 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	15 Kab/Kota	17 Kab/Kota	23 Kab/kota	7 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	15 Kab/Kota	17 Kab/Kota	23 Kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah				5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	2 keg	2 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	40%	40%	60%	60%	60%	60%
	- Pengadaan buku bernuansa daerah				200 Eks	200 Eks	230 Eks	250 Eks	260 Eks	Nihil	100 Eks	100 Eks	100 Eks	Nihil	Nihil	150 eks	50%	50%	38%	100%	100%	100%
	- Ganti Rugi Naskah Kuno				Nihil	Nihil	Nihil	10 Naskah	10 Naskah	10 Naskah	Nihil	Nihil	Nihil	10 Naskah	10 Naskah	10 Naskah	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%	100%
	- Bertambahnya koleksi Perpustakaan				10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	10.000 eks	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pengadaan buku digital				Nihil	Nihil	1 Keg	1 Keg	1 Keg	4.000 eks	Nihil	Nihil	1 Keg	1 Keg	1 Keg	4.000 eks	Nihil	Nihil	100%	100%	100%	100%
	- Pengadaan buku digital untuk Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA/SMK				Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	251 sekolah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	251 sekolah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100%	Nihil
6	Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi Pengembangan Budaya Baca				2 keg	2 keg	2 keg	3 keg	3 keg	3 keg	2 keg	2 keg	2 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Serah simpan KCKR				100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Kegiatan Bedah Buku				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terencana dan tersusunnya Program Budaya Baca				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Film Dokumenter				1 Film	1 Film	2 Film	3 Film	5 Film	3 Film	1 Film	1 Film	2 Film	3 Film	5 Film	3 Film	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Qanun Perpustakaan				Nihil	Nihil	1 Qanun	1 Qanun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 Qanun	1 Qanun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%	Nihil	Nihil
	- Qanun Kearsipan				Nihil	Nihil	1 Qanun	1 Qanun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 Qanun	1 Qanun	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%	Nihil	Nihil
8	Terpubikasi dan tersosialisasi Minat dan Budaya Baca				4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Terlaksananya kegiatan hari kunjung Perpustakaan				1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	NIHIL	NIHIL	1 kali	100%	100%	100%	NIHIL	NIHIL	100%
	- Adanya ratu dan raja baca Aceh				1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Terlaksananya kegiatan story telling				2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Terlaksananya Kegiatan Kampanye iterasi				4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	5 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	5 Kali	4 Kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan				23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	23 Kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terbangunnya Gedung Perpustakaan				1 gedung	1 gedung lanjutan	1 gedung lanjutan	1 gedung lanjutan	1 gedung lanjutan	1 gedung lanjutan	1 gedung	1 gedung lanjutan	1 gedung lanjutan	NIHIL	1 gedung lanjutan	1 gedung lanjutan	100%	100%	100%	Nihil	100%	100%
12	Terbangunnya Gedung Perpustakaan Kecamatan dan Gampong				5 unit	1 unit	12 unit	Nihil	Nihil	Nihil	5 unit	1 unit	12 unit	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%	100%	Nihil	Nihil	Nihil
BIDANG KEARSIPAN																						
	Terlaksananya Input Data Sistem Informasi Kearsipan Nasional-Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN)				1 simpul jaringan	1 simpul jaringan	15 simpul jaringan	60 simpul jaringan	64 simpul jaringan	20 simpul jaringan	1 simpul jaringan	1 simpul jaringan	15 simpul jaringan	60 simpul jaringan	64 simpul jaringan	20 simpul jaringan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

94.94 89.4

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun																	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Terklasifikasinya data kearsipan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya dokumen Data Kearsipan yang baik				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terpeliharanya peralatan JIKN				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedia sarana pengolahan dan penyimpanan arsip				1 Keg	1 Keg	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Nihil	1 Keg	1 Keg	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Nihil	100%	100%	100%	100%	100%	0%
	Terdata dan tertata Dokumen / Arsip Daerah				5 daftar	5 daftar	5 daftar	5 daftar	5 daftar	5 daftar	7 daftar	6 daftar	6 daftar	7 daftar	8 daftar	5 daftar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terbangun sistem keamanan penyimpanan data				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Survey / Pelacakan dan Ganti Rugi Dokumen / wawancara Tokoh Pelaku Sejarah				2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Terlaksananya Pelacakan dan Ganti Rugi Dokumen				5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Terlaksananya Wawancara tokoh/pelaku sejarah				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya arsip yang terolah				50 ml	50 ml	50 ml	100 ml	100 ml	100 ml	50 ml	50 ml	50 ml	100 ml	100 ml	100 ml	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Arsip yang direproduksi/dialih media				5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	5.000 lbr	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Fumigasi Arsip				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Terlaksananya Restorasi Arsip				1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	1.000 lembar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusun dan Terbitan Naskah Sumber				1 kali	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 kali	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data				5 Kab/kota	9 Kab/Kota	13 Kab/kota	15 Kab/Kota	17 Kab/Kota	23 Kab/kota	5 Kab/kota	9 Kab/Kota	13 Kab/kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	15 Kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersosialisasi Arsip di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terbimbingnya Tenaga Arsiparis				1 keg	4 keg	6 keg	8 keg	10 keg	23 keg	1 keg	4 keg	6 keg	8 keg	10 keg	23 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terbentuk Tim Penilai Arsiparis Berprestasi				1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terbentuknya Tim Penilai Angka Kredit Arsiparis				1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ternilainya Arsiparis				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	100%	100%	100%	100%	100%

66.666667

79.3

Tabel T.C 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

URAIAN	URAIAN SESUAI PERMENDAGRI 050	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	911,146,468	911,146,468
Belanja Pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	18,222,929,360	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	911,146,468	911,146,468.00
BELANJA LANGSUNG		65,677,070,640	28,819,147,363	29,918,757,720	30,538,143,496	31,978,143,496	61,470,802,907	25,868,147,363	26,968,757,720	27,088,143,496	29,028,143,496	0.94	0.90	0.90	0.89	0.91	155,272,900,653.96	170,424,994,982
Program Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22,978,382,658	15,734,449,194	15,806,630,194	15,841,630,194	15,906,630,194	18,772,114,925	12,784,449,194	12,856,630,194	12,891,630,194	12,956,630,194	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	70,520,158,541.94	70,261,454,701
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	254,570,250	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	254,570,250	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,545,703	10,545,703
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	631,200,764	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	631,200,764	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	26,312,008	26,312,008
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	248,184,000	248,184,000	265,000,000	270,000,000	285,000,000	248,184,000	248,184,000	265,000,000	270,000,000	285,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163,680	13,163,680
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	199,619,962	90,000,000	110,000,000	125,000,000	150,000,000	199,619,962	90,000,000	110,000,000	125,000,000	150,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746,200	6,746,200
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	173,872,323	90,000,000	110,000,000	125,000,000	150,000,000	173,872,323	90,000,000	110,000,000	125,000,000	150,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,488,723	6,488,723
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82,172,215	82,172,215	82,172,215	82,172,215	82,172,215	82,172,215	82,172,215	82,172,215	82,172,215	82,172,215	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,108,611	4,108,611
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,123,256,690	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	9,123,256,690	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	271,232,567	271,232,567
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,060,818,312	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,060,818,312	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50,608,183	50,608,183
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	137,767,430	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	137,767,430	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,977,674	4,977,674
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,485,355	40,485,355	40,485,355	40,485,355	40,485,355	40,485,355	40,485,355	40,485,355	40,485,355	40,485,355	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,024,268	2,024,268
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	584,635,000	584,635,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	584,635,000	584,635,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	29,692,700	29,692,700
Penyediaan hari-hari Besar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39,750,000	39,750,000	39,750,000	39,750,000	39,750,000	39,750,000	39,750,000	39,750,000	39,750,000	39,750,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,500	1,987,500
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS (Jasa Keamanan Kantor)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,319,222,624	2,319,222,624	2,319,222,624	2,319,222,624	2,319,222,624	2,319,222,624	2,319,222,624	2,319,222,624	2,319,222,624	2,319,222,624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,961,131	115,961,131
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,876,560,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,876,560,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	158,765,600	158,765,600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,104,745,100	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	1,104,745,100	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25,047,451	25,047,451
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,435,145,257	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,435,145,257	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	104,351,453	104,351,453
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	666,377,376	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	666,377,376	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	30,663,774	30,663,774
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	40,346,064,271	11,087,803,706	12,052,584,224	12,582,000,000	13,812,000,000	40,346,064,271	11,087,803,706	12,052,584,224	12,582,000,000	13,812,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	76,206,572,201.00	89,880,452,201
Pembangunan Gedung Kantor	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	295,076,567	295,076,567	324,584,224	350,000,000	375,000,000	295,076,567	295,076,567	324,584,224	350,000,000	375,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16,397,374	16,397,374
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	511,147,640	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	511,147,640	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	65,111,476	65,111,476
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	1,857,252,096	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,857,252,096	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	78,572,521	78,572,521
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	212,230,139	212,230,139	233,000,000	240,000,000	260,000,000	212,230,139	212,230,139	233,000,000	240,000,000	260,000,000	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11,574,603	11,574,603
Pengadaan Meubelur	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	9,085,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	9,085,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	98,850,000	98,850,000
Pengadaan UPS/Stabilizer komputer	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	27,453,729	100,000,000	115,000,000	125,000,000	135,000,000	27,453,729	100,000,000	115,000,000	125,000,000	135,000,000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5,024,537	5,024,537
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Pengembangan Perpustakaan Deposit	253,465,120	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	253,465,120	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	14,534,651	14,534,651
Pengadaan Komputer	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	18,926,986,980	5,000,000,000	5,600,000,000	5,700,000,000	6,000,000,000	18,926,986,980	5,000,000,000	5,600,000,000	5,700,000,000	6,000,000,000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	412,269,870	412,269,870
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	580,497,000	580,497,000	640,000,000	670,000,000	710,000,000	580,497,000	580,497,000	640,000,000	670,000,000	710,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	31,809,940	31,809,940
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8,100,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,500,000,000	2,300,000,000	8,100,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,500,000,000	2,300,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	141,000,000	141,000,000

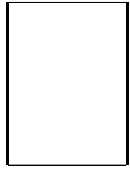
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip																			
Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah																			
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Data																			
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber																			
Penyediaan Sarana Layanan Informasi																			
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah/Swasta																			
Bimbingan Penyuluhan Kearsipan																			
Program Peningkatan SDM Kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Tim Penilai Arsiparis Berprestasi																			
Tim Penilai Angka Kredit Arsiparis																			
Bimbingan Teknis Tenaga Arsiparis/Pustakawan																			
Penilaian Arsiparis																			
Jumlah		83,900,000,000	47,042,076,723	48,141,687,080	48,761,072,856	50,201,072,856	79,693,732,267	44,092,076,723	45,191,687,080	45,311,072,856	47,251,072,856	0.95	0.94	0.94	0.93	0.94	156,184,047,122	171,336,141,450	

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan	Meningkatnya minat baca masyarakat	Penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan perlombaan membaca	Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca
			Penyediaan koleksi bahan pustaka	Meningkatnya koleksi buku di perpustakaan
			Penyediaan sarana dan perasarana perpustakaan	Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
			Peningkatan Karakter Pengelola Pustaka dan Pustakawan yang berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kapasitas dan daya saing pengelola pustaka dan pustakawan melalui sertifikasi dan pelatihan
2	Tersedianya Koleksi Naskah Kuno	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang ada di aceh	Pengumpulan Naskah Kuno pada Masyarakat	Penyediaan Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
3	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Pengelolaan Kearsipan secara Baku	Pelestarian dan Penyelamatan Arsip dokumen/arsip daerah	Pelacakan, alih media arsip
			Peningkatan pengawasan dan pembinaan secara internal dan eksternal	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara internal dan eksternal
			Penguatan Kapasitas SDM	Melakukan sertifikasi terhadap jabatan fungsional dan pengelola kearsipan
			Penguatan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik untuk Pelayanan kearsipan kepada publik (JIKN, JIKA, SIKD)	Melakukan publikasi dan promosi kearsipan dengan gerasakan aceh sadar arsip

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023 - 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja				
					Tahun				
					2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Pada Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15.12	16.31	17.51	18.71	19.91	19.91
2	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang ada di aceh	Rasio naskah kuno yang ada di aceh	Rasio	0.03125	0,0375	0,04375	0,05	0,5625	0,5625
3	Pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	50	67	76	82	97	97
4	Terwujudnya tertib arsip dilingkungan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	20	25	30	35	40	40
5	Terwujudnya Pelayanan Kearsipan yang berkualitas	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0.007	0,010	0,011	0,013	0,015	0,015



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
Perintah Aceh

SKPA	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Real 2021	%	Sumber Dana 2021	Pagu 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
			4	5	6	7	8								2023		2024		2025		2026			
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
											#####			#####		60,138,678,771		51,760,012,329		51,910,090,054		#####	213,118,871,208	
SKPA	kelancaran administrasi kantor, operasional kantor yang efektif dan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh	X	X		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Telaksananya Kegiatan Aparatur Pemerintah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	68,449,697,850	93.3		#####		37,982,378,554		37,854,559,554		37,839,559,554		#####	151,381,057,216	
SKPA			X	X		01	1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terencana dan tersusunnya program, kegiatan dan sub kegiatan	Dokumen perencanaan dan pelaporan	766,282,420	90.9		885,771,014	12 dok	700,000,000	12 dok	700,000,000	12 dok	700,000,000	12 dok	700,000,000	2,800,000,000	
SKPA	Tercapainya Tujuan/Sasaran Program, Kegiatan Dinas/Badan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh dan Kab/Kota	X	X		01	1.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	580,317,010	82.84	SOA	631,200,764	3 RKA 3 DPA 1 Renja	500,000,000	3 RKA 3 DPA 1 Renja	500,000,000	3 RKA 3 DPA 1 Renja	500,000,000	3 RKA 3 DPA 1 Renja	500,000,000	2,000,000,000	Aceh
SKPA	Terukurnya kinerja pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh	X	X		01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	185,965,410	98.92	SOA	254,570,250	1 LKJ 1 LKPJ 1 LPPA 1 REKAM 12 REA Keu	200,000,000	1 LKJ 1 LKPJ 1 LPPA 1 REKAM 12 REA Keu	200,000,000	1 LKJ 1 LKPJ 1 LPPA 1 REKAM 12 REA Keu	200,000,000	1 LKJ 1 LKPJ 1 LPPA 1 REKAM 12 REA Keu	200,000,000	800,000,000	Aceh
SKPA			X	X		01	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	15,824,545,507	92.2		#####	90%	18,222,929,360	90%	18,222,929,360	90%	18,222,929,360	90%	#####	72,891,717,440	
SKPA	Tersedianya kebutuhan belanja Pegawai	ASN	X	X		01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	15,824,545,507	86.84	DAU PAA SOA	18,222,929,360	14 bin	18,222,929,360	14 bin	18,222,929,360	14 bin	18,222,929,360	14 bin	18,222,929,360	72,891,717,440	
SKPA			X	X		01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	655,325,218	87.6		621,676,285	85%	628,184,000	85%	485,000,000	85%	720,000,000	85%	585,000,000	2,418,184,000	
SKPA	Tersedianya Pakaian Dinas bagi ASN	ASN	X	X		01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	0	200 psg	200,000,000	-	0	200 psg	200,000,000	-	0	400,000,000	
SKPA	Meningkatkan SDM Bidang Kearsipan dan Perpustakaan	ASN	X	X		01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	244,772,080	97.57	SOA	248,184,000	20 org	248,184,000	25 org	265,000,000	25 org	270,000,000	25 org	285,000,000	1,068,184,000	
SKPA	Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Perpustakaan dan Kearsipan tentang Peraturan Perundang-Undangan	Pengelola Perpustakaan dan SDM Kearsipan	X	X		01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140,529,538	81.1	SOA	199,619,962	2 draf 50 org	90,000,000	2 draf 50 org	110,000,000	2 draf 50 org	125,000,000	2 draf 50 org	150,000,000	475,000,000	
SKPA	Meningkatnya SDM Kearsipan	SDM Kearsipan	X	X		01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270,023,600	83.45	SOA	173,872,323	50 org 4 kab/kota	90,000,000	50 org 6 kab/kota	110,000,000	50 org 8 kab/kota	125,000,000	50 org 10 kab/kota	150,000,000	475,000,000	
SKPA	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan profesional		X	X		01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43,449,236,802	98.1		#####	90%	6,297,292,570	90%	6,312,657,570	90%	6,312,657,570	90%	6,312,657,570	25,235,265,280	
SKPA	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKA	X	X		01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran	139,765,000	99.91	SOA	82,172,215	12 bin	82,172,215	12 bin	82,172,215	12 bin	82,172,215	12 bin	82,172,215	328,688,860	
SKPA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKA	X	X		01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran	7,781,710,800	99.91	SOA	9,123,256,690	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	18,000,000,000			
SKPA	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	DPKA	X	X		01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terkelolanya Bahan Logistik Kantor	359,142,011	79.54	SOA	1,060,818,312	3 keg 12 bin	1,000,000,000	3 keg 12 bin	1,000,000,000	3 keg 12 bin	1,000,000,000	3 keg 12 bin	1,000,000,000	4,000,000,000	
SKPA		DPKA	X	X		01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	516,974,773	99.27	SOA	137,767,430	12 bin	90,000,000	12 bin	90,000,000	12 bin	90,000,000	12 bin	90,000,000	360,000,000	
SKPA		DPKA	X	X		01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	34,202,755,366	97.94	SOA	40,485,355	12 bin	40,485,355	12 bin	40,485,355	12 bin	40,485,355	12 bin	40,485,355	161,941,420	
SKPA		ASN	X	X		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448,888,852	95.61	SOA	584,635,000	5 kali 10 kab/kota	584,635,000	5 kali 10 kab/kota	600,000,000	5 kali 10 kab/kota	600,000,000	5 kali 10 kab/kota	600,000,000	2,384,635,000	
SKPA			X	X		01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan jumlah aset barang milik daerah	-			-	27 unit	2,450,000,000	27 unit	2,450,000,000	22 unit	2,200,000,000	22 unit	2,200,000,000	9,300,000,000	
SKPA	Meningkatkan Pelayanan Mobil Keliling	mobil pusling	X	X		01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,200,000,000	4,800,000,000	

SKPA	penunjang pelayanan perpustakaan dan kearsipan		X	X	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	5 unit	250,000,000	5 unit	250,000,000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	500,000,000	
SKPA			X	X	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	20 unit	1,000,000,000	20 unit	1,000,000,000	20 unit	1,000,000,000	20 unit	1,000,000,000	4,000,000,000	
SKPA			X	X	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa layanan kantor	kelancaran oprasional kantor	4,797,191,465	79.2	6,235,532,624	12 bin	5,358,972,624	12 bin	5,358,972,624	12 bin	5,358,972,624	12 bin	5,358,972,624	12 bin	5,358,972,624	21,435,890,496
SKPA	Meningkatnya Pelayanan umum perkantoran	dinas DPKA	X	X	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57,160,000	99.21	SOA	39,750,000	12 bin	39,750,000	12 bin	39,750,000	12 bin	39,750,000	12 bin	39,750,000	159,000,000	
SKPA	Terpenuhinya Oprasional Kantor	dinas DPKA	X	X	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,091,523,465	63.39	SOA	2,319,222,624	12 bin	2,319,222,624	12 bin	2,319,222,624	12 bin	2,319,222,624	12 bin	2,319,222,624	9,276,890,496	
SKPA	Meningkatnya Pelayanan Umum Kantor	dinas DPKA	X	X	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,648,508,000	85.36	SOA	3,876,560,000	12 bin	3,000,000,000	12 bin	3,000,000,000	12 bin	3,000,000,000	12 bin	3,000,000,000	12,000,000,000	
SKPA			X	X	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	kelancaran oprasional kantor	2,957,116,438	69.4	4,206,267,733	12 bin	4,325,000,000	12 bin	4,325,000,000	12 bin	4,325,000,000	12 bin	4,325,000,000	12 bin	4,325,000,000	17,300,000,000
SKPA	Kelancaran operasional kendaraan dinas	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	X	X	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	959,112,310	45.31	DAU	1,104,745,100	7 unit	350,000,000	7 unit	350,000,000	7 unit	350,000,000	7 unit	350,000,000	1,400,000,000	
SKPA			X	X	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	NIHIL	-	-	NIHIL	20 unit	1,000,000,000	20 unit	1,000,000,000	20 unit	1,000,000,000	20 unit	1,000,000,000	4,000,000,000	
SKPA			X	X	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	NIHIL	-	-	NIHIL	25 unit	125,000,000	25 unit	125,000,000	25 unit	125,000,000	25 unit	125,000,000	500,000,000	
SKPA			X	X	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	NIHIL	-	-	NIHIL	3 unit	250,000,000	3 unit	250,000,000	3 unit	250,000,000	3 unit	250,000,000	1,000,000,000	
SKPA		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X	X	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,565,209,124	92.23	SOA	2,435,145,257	3 gedung 12 bin	2,000,000,000	3 gedung 12 bin	2,000,000,000	3 gedung 12 bin	2,000,000,000	3 gedung 12 bin	2,000,000,000	8,000,000,000	
SKPA		Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	X	X	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	432,795,004	97.33	SOA	666,377,376	12 bin	600,000,000	12 bin	600,000,000	12 bin	600,000,000	12 bin	600,000,000	2,400,000,000	
SKPA			1					PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN																
SKPA			1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
ARPUS	Meningkatnya minat baca masyarakat	Masyarakat	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Indeks Gemar membaca	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	36,799,596,263	50.5	#####	0.0017	19,730,418,556	0.0018	11,416,922,275	0.0019	11,507,000,000	0.002	#####	53,741,340,831		
ARPUS		Masyarakat	2	23	02	1.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Koleksi Bahan Pustaka dan Kompetensi SDM Perpustakaan	Persentase Koleksi Bahan Pustaka dan Kompetensi SDM Perpustakaan	25,743,076,620	42.6	#####	50%	8,749,921,556	60%	9,136,922,275	70%	8,840,000,000	80%	9,220,000,000	34,271,843,831		
ARPUS	Meningkatnya Pengembangan Baringan Aplikasi Otomasi	Perpustakaan Kab/Kota dan Perpustakaan Sekolah	2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK : (Aplikasi Otomasi Jaringan) dan (Aplikasi iPustaka)	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Aplikasi Otomasi Jaringan) dan (Aplikasi iPustaka)	396,684,542	82.2	OA	295,076,567	10 kab/kota	737,691,417	9 kab/kota	663,922,275	Prov. dan Kab/Kota	200,000,000	Prov. dan Kab/Kota	200,000,000	1,801,613,692	
ARPUS	Meningkatkan pelayanan yang prima dan modern bagi masyarakat	Masyarakat/ pemustaka	2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Layanan Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Lapas, Hari Kunjung Pustaka	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	915,551,080	106.2	OA	511,147,640	35.000 org	650,000,000	45.000 org	700,000,000	55.000 org	750,000,000	65.000 org	800,000,000	2,900,000,000	
ARPUS	Terpeliharanya kaskah kuno, bahan pustaka dari kerusakan	Koleksi perpustakaan	2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	165,570,000	96.87	OA	1,857,252,096	500 lb 500 lb 2 kali 36 eks 100 eks	1,500,000,000	500 lb 500 lb 2 kali 36 eks 100 eks	1,500,000,000	500 lb 500 lb 2 kali 36 eks 100 eks	1,500,000,000	500 lb 500 lb 2 kali 36 eks 100 eks	1,500,000,000	6,000,000,000	
ARPUS	Meningkatnya Mutu Lembaga Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi	Persentase Perpustakaan yang sudah sesuai Standar Nasional Perpustakaan	545,377,337	95.75	OA	212,230,139	25 %	212,230,139	25 %	233,000,000	25 %	240,000,000	25 %	260,000,000	945,230,139	
ARPUS	Meningkatkannya Mutu lembaga Perpustakaan khusus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan SKPA	2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan SKPA	Persentase Perpustakaan SKPA yang sudah sesuai Standar Nasional Perpustakaan	193,614,530	98.78	DAU SOA	9,085,000,000	56 SKPA	250,000,000	56 SKPA	25,000,000	56 SKPA	25,000,000	56 SKPA	25,000,000	325,000,000	

ARPUS	Terwujudnya penyelenggaraan dan Pengelolaan Kearsipan secara Baku	Pemerintah Aceh	2	24	02					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terlaksananya Penyelenggaraan dan pengelolaan arsip secara baku	Persentase Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan yang mengelola arsip secara baku	1,068,430,577	98.9		1,229,847,967	17	1,525,881,661	9	1,538,530,500	9	1,613,530,500	15	1,718,530,500	6,396,473,161	
ARPUS	Meningkatnya Arsip Dinamis Provinsi	Pemerintah dan Masyarakat	2	24	02	1.0	1			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis provinsi	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	752,769,924			648,470,962	10 daftar	912,351,161	10 daftar	920,000,000	10 daftar	980,000,000	10 daftar	1,010,000,000	3,822,351,161	
ARPUS	Terciptanya Pengelolaan arsip yang andal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kabupaten/Kota dan SPKA	2	24	02	1.01	01			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang Diciptakan dan Digunakan	752,769,924	99.55	SOA	536,119,801	80 ML 55 SKPA, 10 SKPA	500,000,000	80 ML 55 SKPA, 10 SKPA	500,000,000	80 ML 55 SKPA, 10 SKPA	550,000,000	80 ML 55 SKPA, 10 SKPA	575,000,000	2,125,000,000	
ARPUS	Penyelamatan Arsip Dinamis dan Penambahan Khasanah Arsip Statis	Arsip Dinamis dan Arsip Statis	2	24	02	1.01	02			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang dinilai	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	5 daftar	300,000,000	5 daftar 2 kali	300,000,000	5 daftar 2 kali	300,000,000	5 daftar 2 kali	300,000,000	1,200,000,000	
ARPUS	Meningkatnya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	SKPA dan Kab/Kota	2	24	02	1.01	03			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Arsip Dinamis yang dilakukan Pengawasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	112,351,161	20 SKPA 7 Kab/Kota	112,351,161	25 SKPA 7 Kab/Kota	120,000,000	25 SKPA 8 Kab/Kota	130,000,000	27 SKPA 9 Kab/Kota	135,000,000	497,351,161	
ARPUS	Terselamatkannya Arsip Statis Daerah Provinsi	Provinsi dan Kab/Kota	2	24	02	1.0	2			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Diselamatkan	261,024,367			197,846,505	2000 berkas	230,000,000	2000 berkas	235,000,000	2000 berkas	250,000,000	2000 berkas	325,000,000	1,040,000,000	
ARPUS	Terumpulnya salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	ANRI	2	24	02	1.02	01			Pengumpulan dan Penyampai Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampai Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	141,276,767	94.75	SOA	19,848,000	2 naskah 5 kab/kota 2 daftar	100,000,000	2 naskah 5 kab/kota 2 daftar	100,000,000	2 naskah 5 kab/kota 2 daftar	100,000,000	2 naskah 5 kab/kota 2 daftar	150,000,000	450,000,000	
ARPUS	Terselamatkannya Arsip Statis	Pemerintah Aceh	2	24	02	1.02	02			Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis	119,747,600	99.38	OA	177,998,505	24 ML, 200 ML, 800 Lbr	130,000,000	28 ML, 236 ML, 850 Lbr	135,000,000	34 ML, 256 ML, 980 Lbr	150,000,000	40 ML 300 ML 1100Lbr	175,000,000	590,000,000	
ARPUS	Terlaksananya Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pengguna Arsip	2	24	02	1.0	3			Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Meningkatnya Pengguna Aplikasi Simpul JIKN	Jumlah Pengguna JIKN	54,636,286			383,530,500	40.000 pengunjung	383,530,500	45.000 pengunjung	383,530,500	50.000 pengunjung	383,530,500	55.000 pengunjung	383,530,500	1,534,122,000	
ARPUS	Tersedianya Akses Informasi kearsipan kepada Publik melalui Simpul JIKN	Pemerintah dan Masyarakat	2	24	02	1.03	01			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengguna JIKN	54,636,286	99.34	SOA	383,530,500	3.000 Metadata, 7 Kab /Kota	383,530,500	3.000 Metadata, 7 Kab /Kota	383,530,500	3.000 Metadata, 7 Kab /Kota	383,530,500	3.000 Metadata, 7 Kab /Kota	383,530,500	3.000 Metadata, 7 Kab /Kota	1,534,122,000
ARPUS	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintah Aceh, dan Masyarakat	2	24	03					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Terlaksananya perlindungan & penyelamatan arsip	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	160,409,352			685,455,013	25%	421,012,802	30%	211,012,802	35%	240,982,802	40%	255,982,802	918,991,208	
ARPUS	Terlambatnya Pengelolaan Arsip	Dokumen	2	24	03	1.0	1			Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dimusnahkan	-	-		273,497,144	3000 berkas	100,000,000	3000 berkas	100,000,000	3000 berkas	100,000,000	3000 berkas	100,000,000	400,000,000	
ARPUS	Terpilainya Arsip yang dimusnahkan	Dokumen	2	24	03	1.01	01			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	273,497,144	5 dfatar . 2 kegiatan . 6 kab/kota	100,000,000	5 dfatar . 2 kegiatan . 6 kab/kota	100,000,000	5 dfatar . 2 kegiatan . 6 kab/kota	100,000,000	5 dfatar . 2 kegiatan . 6 kab/kota	100,000,000	400,000,000	
ARPUS	Terselamatkannya Arsip Pengabungan dan Pemekaran Daerah	SKPA dan Kab/Kota	2	24	03	1.0	3			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang diselamatkan	77,639,472	97		306,927,869	200 berkas	215,982,802	200 berkas	105,982,802	200 berkas	105,982,802	200 berkas	105,982,802	423,931,208	
ARPUS	Terdatanya Arsip Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Kab/Kota dan SKPA	2	24	03	1.03	01			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Dinilai, Diserahkan dan Dimusnahkan	77,639,472	96.53	SOA	105,982,802	5 kab/kota	105,982,802	5 kab/kota	105,982,802	5 kab/kota	105,982,802	5 kab/kota	105,982,802	423,931,208	
ARPUS	Terdampingnya Kab/Kota dalam Penyelamatan Arsip	Kab/Kota	2	24	03	1.03	03			Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang diselamatkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	200,945,067	5 kab/kota 3 kl 3 tokoh 9 naskah	110,000,000	5 kab/kota 3 kl 3 tokoh 9 naskah	110,000,000	5 kab/kota 3 kl 3 tokoh 9 naskah	110,000,000	5 kab/kota 3 kl 3 tokoh 9 naskah	110,000,000	440,000,000	
ARPUS	Terjaganya Keaslian Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Arsip Statis	2	24	03	1.0	4			Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Terlaksananya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Jumlah Arsip Statis yang dilih Medikan	82,769,880	98.6		105,030,000	14000 lbr	105,030,000		105,030,000		135,000,000		150,000,000	495,060,000	

ARPUS	Terwujudnya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media	Arsip Statis	2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip yang Dialih Media	82,769,880	98.56	OA SOA	105,030,000	14000 lbr	105,030,000	14000 lbr	105,030,000	18000 lbr	135,000,000	21000 lbr	150,000,000	495,060,000
ARPUS	Terselenggaranya Pelayanan Kearsipan yang berkualitas	Pemerintah Aceh dan Masyarakat	2	24	04			PROGRAM PERIZZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terlaksananya perizinan penggunaan arsip	Rasio arsip yang dimanfaatkan	297,275,780	96.3		437,320,731	0.010	350,000,000	0.011	400,000,000	0.013	400,000,000	0.015	450,000,000	1,600,000,000
ARPUS	Terselenggaranya Pelayanan Kearsipan yang berkualitas	Pemerintah Aceh dan Masyarakat	2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Kearsipan	Jumlah pengguna arsip statis sebagai informasi publik baik melalui ruang baca, Arsip keliling, maupun melalui website ITKN	297,275,780	96.3		437,320,731	50.208 pengunjung	350,000,000	60.000 pengunjung	400,000,000	70.000 pengunjung	400,000,000	80.000 pengunjung	450,000,000	1,600,000,000
ARPUS	Terwujudnya Layanan Arsip Bagi Masyarakat	Pengguna Arsip	2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Layanan Arsip	Jumlah Pengguna Arsip	297,275,780	96.28	SOA	437,320,731	1 kl 500 org 10 kab/kota 5 skt	350,000,000	1 kl 300 org 10 kab/kota 5 skt	400,000,000	1 kl 500 org 10 kab/kota 5 skt	400,000,000	1 kl 700 org 10 kab/kota 5 skt	450,000,000	1,600,000,000

Tabel 7.1. (T-C.28)

netapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran P

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capain Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)
				1	2	3	4	
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Perpustakaan							
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	indeks	0.001	0,0017	0,0018	0,0019	0,002	0,002
	Rasio naskah kuno yang ada di aceh	Rasio	0.03125	0,0375	0,04375	0,05	0,5625	0,5625
B.	Kearsipan							
	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	50	67	76	82	97	97
	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	20	25	30	35	40	40
	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0.007	0,010	0,011	0,013	0,015	0,015

Banda Aceh, Januari 2022
 i Dinas Perpustakaan dan Kearsipar

Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP
 Pembina Utama Muda
 NIP 19751105 199612 1 002

Tabel T.B. 35

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	PERMASAALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
3.	Minat baca masyarakat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> -Koleksi Bahan Perpustakaan belum lengkap sesuai SNP, -Kurangnya gebrakan atau kegiatan yang bisa meningkatkan gerakan gemar membaca -Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> -Komitmen stakeholder untuk koleksi perpustakaan lengkap -Kerjasama dengan semua pihak terutama sekolah dan yayasan agar berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan minat baca -Penguatan dukungan Pemerintah untuk memfasilitasi Perpustakaan
1.	SDM yang kurang berkompetensi	<ul style="list-style-type: none"> -Kaderisasi SDM Perpustakaan dan Kearsipan masih rendah -Kurangnya pelatihan service excelent (pelayanan terbaik) dan motivasi untuk pengembangan diri bagi SDM -Pejabat struktural kurang memahami tupoksi kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan secara teknis -Kurangnya kesadaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya penyelamatan Arsip/Dokumen -Minimnya anggaran yang disediakan untuk bidang kearsipan dan perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Pertambahan SDM Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan bisa menjadi ujung tombak keberhasilan kinerja Dinas -Semakin bertambahnya tenaga pustakawan dan arsiparis diharapkan dapat berperan aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat -Melacak dan Melestarikan Arsip-Arsip Daerah yang ada dimasyarakat -Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Aceh dan Nasional (JIKA-JIKN) -Mengadakan pameran-pameran kearsipan untuk mempublikasikannya tentang khsanah budaya dan sejarah bangsa
2.	- Kurangnya pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Perpustakaan setelah dilaksanakan pembangunan gedung perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Penyebaran Perpustakaan diberbagai daerah serta prasarana Perpustakaan secara gratis

Banda Aceh, Januari 2022
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh,

Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP
Pembina Utama Muda
NIP 19751105 199612 1 002

NO	PERMASAALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG

